



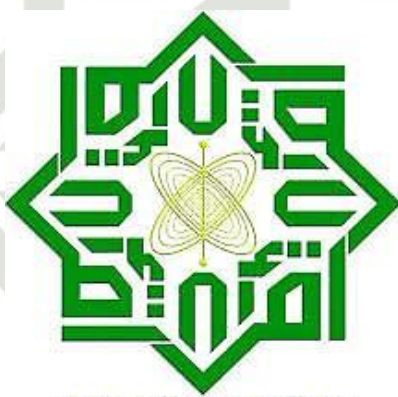
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN
2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB PASIRPENGARAIAN ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Skrripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

BISMAN

NIM: 11727101877

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTSN SYARIF KASIM

RIAU-PEKNBARU

1443 H/2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian Rokan Hulu.

Nama : Bisman

NIM : 11727101877

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan diterima dan di setujui untuk di ujikan sidang munaqosah pada Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru Rabu, 21 juli 2021

Pembimbing skripsi

Dr. H. Maghfiroh, M.A
NIP:197210252003121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **"Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian Rokan Hulu"**.

Nama : Bisman
Nim : 11727101877
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimonogaskan pada :

Hari / Tanggal : Selasa 19 Oktober 2021

Jam : 08:00 – 12:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munogasih Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munogasih

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rabu 03 November 2021

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M. Ag.

Sekretaris

Musrifah S.H., M.H.

Penguji I

Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji II

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.

NIP : 197410062005011005

Tanggal : 10 September 2021

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



NIM :

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Sunan Gunung Jati Bandung
Ditelaah dan disetujui oleh
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung
Tanggal: 15 Desember 2020
Ditandatangani oleh
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Bisman (2021) : Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian Rokan Hulu.

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan banyaknya narapidana setelah selesai menjalani hukuman narapidana masih melakukan kesalahan yang sama atau *Residivis* dan masih terdapatnya pengedaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, padahal pemerintah telah melakukan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Lokasi penelitian ini adalah Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan Pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Sifat penelitian ini tergolong deskriptif, dan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini dilengkapi dengan bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*. Dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, teknik analisa didalam penelitian ini menggunakan metode *induktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian sudah berjalan dengan menggunakan metode Pembinaan kekeribadian dan Pembinaan kemandirian. Namun pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal dikarenakan ada beberapa program pembinaan yang tidak berkelanjutan dan program pembinaan kemandirian untuk narapidana wanita belum dilaksanakan atau belum terealisasi. Faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan yang dilakukan Lapas kelas IIB Pasirpengaraian terdapat beberapa faktor yaitu: faktor *overcrowded*, (penuh sesak), yaitu seharusnya Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian hanya berkapasitas 175 orang namun kini penghuni sebanyak 855 orang. Faktor kurangnya anggaran dana, faktor kurangnya sarana gedung dan fasilitas dan faktor kurangnya petugas Lapas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang masih saja memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya Tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Sholawat berangkaikan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Ummat Manusia pada ummunnya dan ummat Ialam Khususnya dari zaman kegelapan serta kebodohan Ilmu pengetahuan menuju kealam yang benar dengan cahaya kebenaran serta banyak mengerti ilmu pengetahuan yang membahagiakan Manusia.

Skripsi ini yang berjudul ***“Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian Rokan Hulu.”***. Dengan judul skripsi ini merupakan sebuah cita-cita yang panjang bagi penulis untuk segera bisa menyelesaikan program sarjana. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi peneliti yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Akhirnya, cita-cita itu menuntut keberanian penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

atas bantuan dan kontribusi yang selama ini diberikan kepada penulis, terutama kepada :

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta Do'a ayahanda Amri, dan Ibunda Nurmi, kakak tercinta (Rominah, dan putra), Adinda Nurkholizah dan Rahmadhani.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, S.H., M.H., dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, S.H., M.H., serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Maqhfiroh M.A yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua itu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2017, teman-teman lokal IH B, Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara. Yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi. “Hukum satu Hukum bersaudara”.
9. Rekan seperjuangan Andre Kurniawan Matondang, Ali Imron Nasution, Andres Noverius. Yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis. “ Kalian luar biasa”

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru 21 juli 2021

BISMAN
NIM: 11727101877



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| F. Data dan sumber Data | 12 |
| G. Metode Pengumpulan Data | 14 |
| H. Populasi dan Sampel | 14 |
| I. Metode Analisis Data | 15 |
| J. Sistematika Penulisa..... | 16 |
| BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Pasirpengaraian | 18 |
| B. Jumlah Pegawai Pemasyarakatan dan Kapasitas Lapas Pasirpengarain | 19 |
| C. Visi Dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Pasirpengaraian..... | 20 |
| D. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Pasirpengaraian | 21 |
| E. Tugas dan Fungsi Wewenang Kerja Laspas Pasirpengaraian . | 22 |
| F. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Pasirpengaraian | 27 |
| BAB III TINJAUAN UMUM | |
| A. Tinjauan Umum Pelaksanaan..... | 28 |
| B. Tinjauan Umum Pidana Dan Jenis Pidana | 30 |
| C. Tinjauan Umum Penjara Atau Lembaga Pemsyarakatan..... | 34 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

| | |
|--|----|
| D. Tinjauan Umum Narapidana Dan Pembinaan..... | 35 |
| E. Tinjauan umum Hak-hak Narapidana | 40 |

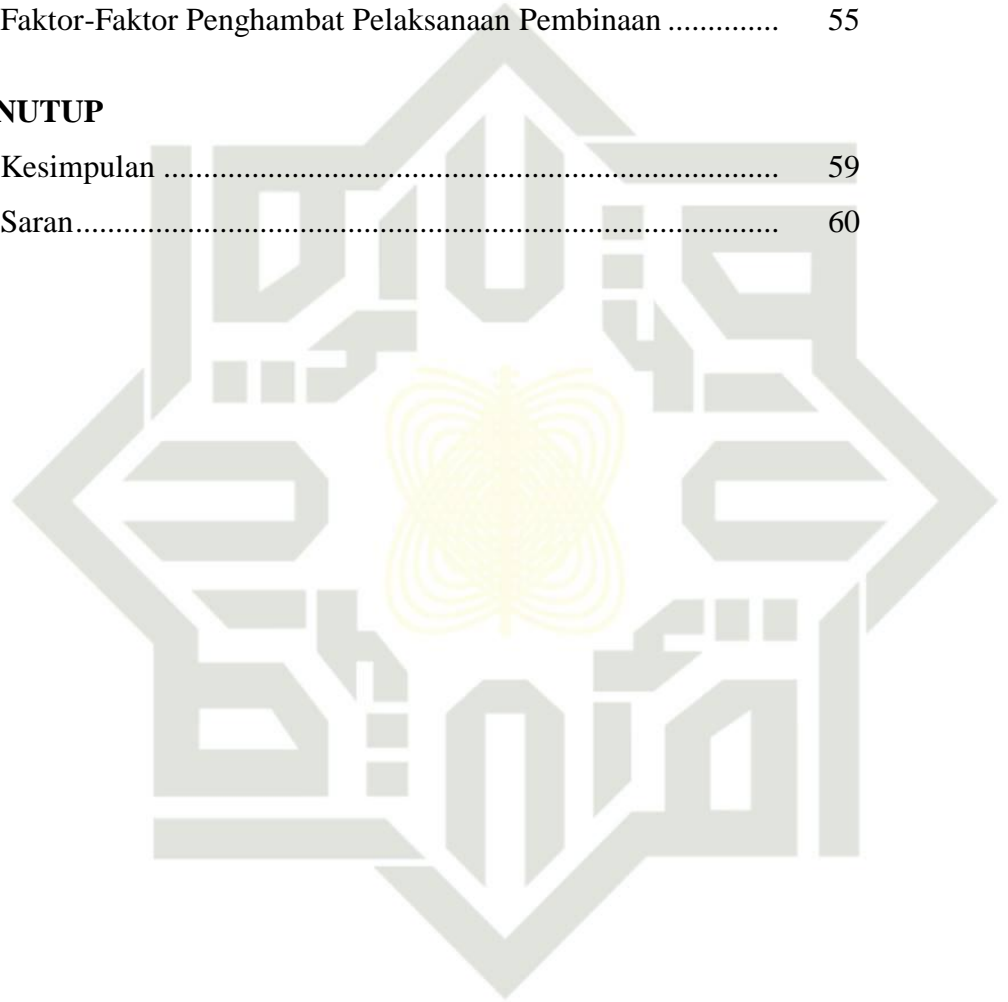
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pasirpengarian | 45 |
| B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan | 55 |

BAB V

PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran..... | 60 |



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------------|----------------------------|----|
| Tabel I.1 | Populasi dan sampel | 15 |
| Tabel II.2 | Jumlah Pegawai Lapas | 19 |

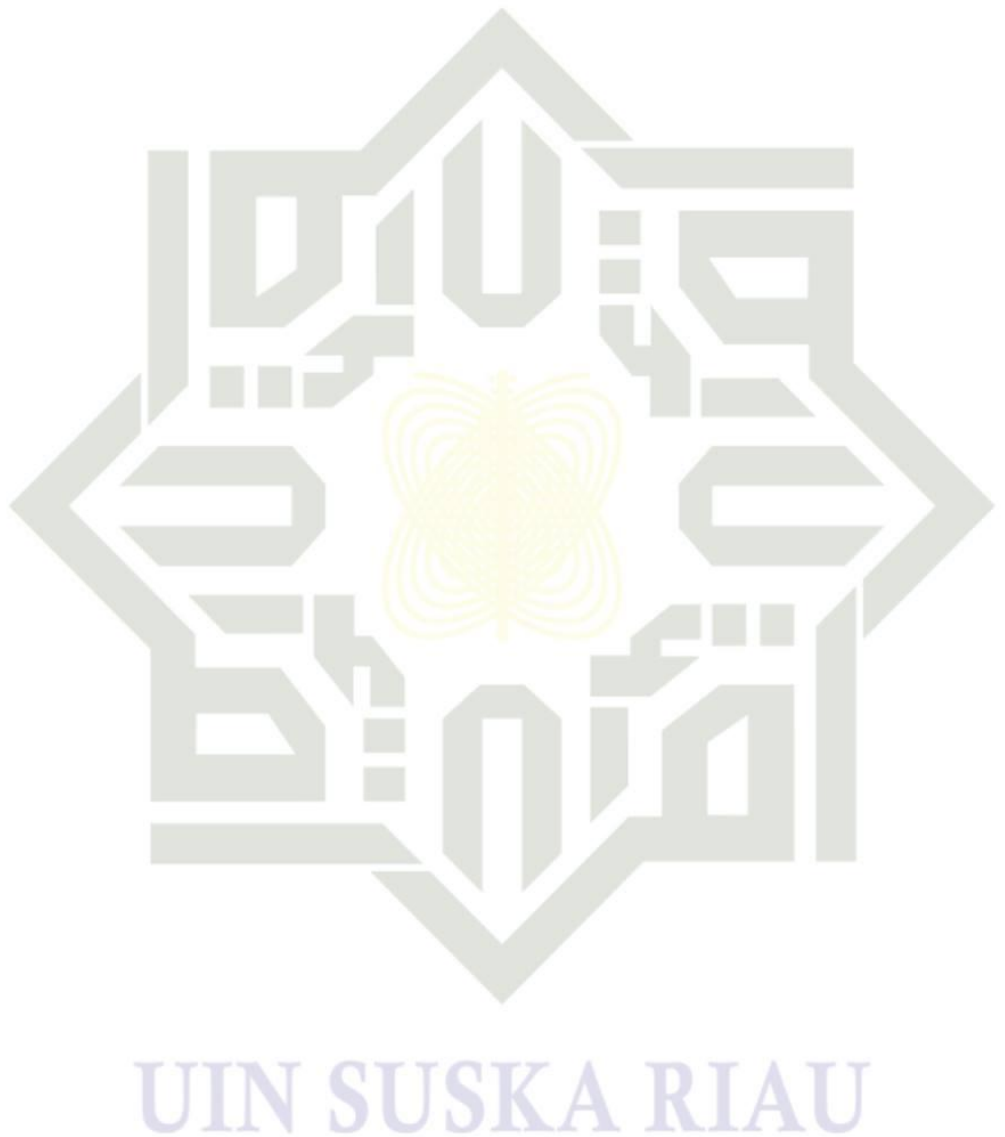


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Diagram Kapasitas Lapas Pasirpengaraian..... | 20 |
|--|----|





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang 1945.¹ Pembangunan Nasional dalam garis besar haluan Negara mencakup semua aspek kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu Masyarakat yang Berkeadilan, yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada Warga Negaranya.²

Hukum sebagai suatu rangkaian Peraturan yang mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia di masyarakat merupakan suatu organ peraturan-peraturan yang Abstrak untuk mengatur kehidupan dan kepentingan Manusia dimasyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya baik sebagai ukuran tingkah setiap orang dalam bertindak, sebagai sarana untuk mengubah masyarakat kearah yang baik, sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan Manusia, maupun dalam menjalankan fungsi untuk menciptakan ketertiban dalam proses Interaksi Sosial, Hukum haruslah berjalan dinamis dan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat.³

¹ Nur Hidayat, *Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga*, UIR Review Volume 01 Nomor 02 Oktober 2017, h. 19.

² Kusnandi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pt Budi Chaniago, 2014), h, 153.

³ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok Sleman Yogyakarta : Kalimedia, 2017), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring perkembangan zaman dalam Era Globalisasi ini, maka semakin kompleks masalah yang dihadapi. Negara Indonesia adalah negara yang luas, dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia akan berakibatkan terhadap Pendidikan, Kemiskinan dan Pengangguran, maka Kriminalitas atau kejahatan akan meningkat.⁴ Karena Ekonomi yang sulit, Pendidikan yang rendah dan ditambah dengan banyaknya pengangguran sehingga banyak orang menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk dirinya dengan cara melakukan kejahatan, mencuri, membegal dan hal sebagainya. Para penegak hukum tidak bisa diam, pemberian sanksi merupakan salah satu solusi untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali atau untuk menimbulkan efek jera para pelakunya dengan cara Pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana.⁵ Di Indonesia, Lapas yang ada saat ini tidak sama dengan penjara yang ada pada masa lalu. Lapas yang ada saat ini adalah hasil penerapan dari sistem Pemasyarakatan (*treatment system of prisoners*). Dalam sistem ini, pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam Lembaga bukan bertujuan sebagai suatu bentuk pembalasan dendam dari Negara atas tindak pidana yang telah dilakukannya, melainkan sebagai tempat melakukan Pembinaan Narapidana (*treatment of offenders*). Di dalam Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan mendapatkan berbagai macam bentuk siksaan dan penderitaan fisik, tetapi lebih ditujukan kepada upaya untuk menyadarkan pelaku

⁴ Yuni Irma Sianturi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas di Sumatra Utara Tahun 2019 Dengan Analisis Jalur*. h. 21.

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 35 Tahun 2018 tentang Realisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tindak pidana yang bersangkutan akan kesalahannya. Konsep Pembinaan yang dianut oleh Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat. Karena itu ada tiga pokok tujuan yang ingin dicapai dalam Pembinaan, yaitu: ⁶

- 1) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- 2) Menjadi Manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Dengan melihat tujuan-tujuan dari Lapas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Lapas sangatlah penting sebagai suatu bagian dari upaya penegakan Hukum Pidana di Indonesia guna menjaga adanya ketertiban, keamanan dan stabilitas dalam masyarakat (Politik Hukum Pidana). Selain itu bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, keberadaan Lapas juga cukup vital, yaitu sebagai suatu media Rehabilitasi diri pribadi secara menyeluruh (menyangkut perilaku, moral maupun mental) dalam upaya untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat (*Resosialisasi*) sebagai satu bagian dari sistem organisasi masyarakat yang ideal.

Dari segi Operasional, Pelaksanaan Pemidanaan dengan sistem Pemasyarakatan ini memerlukan adanya kesinambungan antara aparat penegak Hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan pegawai Lapas (*instrumental input*),

⁶ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djembatan, 2021), h, 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

anggota masyarakat sebagai wadah kehidupan Manusia (*environmental input*), serta narapidana yang menjalani pemidanaan itu sendiri (*rawi input*).⁷

Sayangnya dalam pelaksanaannya, upaya untuk mencapai tujuan Lapas tersebut seringkali menemui kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari faktor *internal* maupun dari faktor *eksternal* Lapas tersebut. Sehingga sering kali hasil yang dicapai oleh Lapas tersebut tidak sesuai dengan idealisme dari keberadaan Lapas itu sendiri. Dengan banyaknya permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan, pemerintahan Indonesia meluncurkan peraturan menteri yang membuat pembaharuan tentang sistem pemsayarakatan dan Pembinaan yaitu mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonseia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Dimana Peraturan Menteri ini di ciptakan atau disahkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan, tujuan utama dari peraturan menteri ini terletak pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
2. Meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku tahanan, narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
3. Meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;

⁷ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 2016), h. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
5. Meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih dalam proses peradilan yang belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah Sipir Penjara.⁸

Pidana Penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dilakukannya dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pidana Penjara diatur dalam dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 12 ayat (3) berbunyi:

Pidana Penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh Tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara Pidana Mati, Pidana Seumur Hidup, Pidana Penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu

⁸ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas Tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena pembarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52 dan 52a.⁹

Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 3 Yang meliputi:

- 1) Pelayanan Tahanan.
- 2) Pembinaan narapidana.
- 3) Pembimbingan Klien.
- 4) Pengelolaan Basan dan Baran.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, narapidana akan diputuskan atau ditempatkan sesuai dengan Hasil Linas dimana dalam setiap tempat akan berbeda dalam melakukan pola Pembinaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut¹⁰:

1. Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan di:
 - a. Lapas *super maximum security*.

⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 6.

¹⁰ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Lapas *maximum security*.
- c. Lapas *medium security*.
- d. Lapas *minimum security*.

Program Pembinaan narapidana Untuk meningkatkan kualitas narapidana bertanggung dimana diletakkanya narapidana sesuai dengan hasil Litmas dan terdapat jenis Lembaga pemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal.¹¹

Namun apa yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ini Pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. Setelah narapidana menjalankan Hukumannya tidak Sedikit pula mereka melakukan hal yang sama, misalnya, pada, 25 Februari 2021 yang diposting di GoRiau.com.¹² Resedivis di Rohul Cabuli Anak Usia 16 Tahun 3 kali, seharusnya narapidana dan tahanan ini di kembalikan kemasyarakat sudah dalam posisi sadar akan kesalahan yang pernah dilakukannya namun, mereka melakukan kejahatan lagi yang disebut dengan Residivis.

Residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Bahkan ketika berada didalam Pemasyarakatanpun tidak sedikit pula Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menggunakan narkoba jenis sabu bahkan

¹¹ Ibid.

¹² GoRiau.com, Kamis 25 Februari 2021, Cabuli Anak Usia 16 Tahun sebanyak 3 kali, Aksi Bejad Resedivis di Rohul ketahuan dari Chat Whatsapp, <http://m.goriau.com/berita/baca/cabuli/-anak-usia-16-Tahun-sebanyak-3-kali-aksi-bejad-resedivis-di-rohul-ketahuan-ketahuan-dari-chat-whatsapp.html>, diakses 21 april,2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengendalikan pengedaran narkoba misalnya pada hari Rabu, 30 Oktober 2020 yang diposting oleh tribun satu.¹³ Tertangkapnya dua pengedar sabu oleh Polres Rohul dari hasil intrograsi bahwa narkoba tersebut diperolehnya dari lapas pasirpengarain, Seharusnya lembaga pemasyarakatan ini menjadi tempat untuk menempa atau membentuk dari karakter dari narapidana untuk meningkatkan kesadaran narapidana dan meningkatkan kualitas dari narapidana malah menjadi tempat persembunyian pengedar narkoba.

Seharusnya Para pelaku tindak pidana dan Tahanan ini yang telah melaksanakan hukuman dengan mengambil hak kemerdekaannya atau hak kebebasanya akan merasakan efek Jera dalam artian tidak akan mengulangi kesalahan yang telah iya lakukan. Dengan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan Pembinaan terhaap narapidana yang dilakukan oleh Lapas Pasirpengaraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan meneliti lebih lanjut dan menuangkannya ditugas akhir (skripsi) dengan judul “ ***Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian Rokan Hulu***”.

¹³ Tribun Satu, Rabu, 30 Oktober 2020, Sat Narkoba Polres Rohul Gencar Berantas Jaringan Narkoba , 30 Gram Sabu Diamankan, <https://m.tribunsatu.com/read-15042-2020-09-30-sat-narkoba-polres-rohul-gencar-berantas-jaringan-narkoba-80-gram-sabu-di-amankan>, di akses 1 juli 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah.¹⁴ Adapun masalah yang diteliti adalah Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan pokok masalah dalam skripsi ini yaitu berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pembinaan narapidana di Lapas kelas II B Pasirpengaraian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanakan Pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B Pasirpengaraian?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian berdasarkan Peraturan Mentri

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), h, 122.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan .

- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Pembinaan Terhadap narapidana.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah berikut:

- 1) Hasil penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya dalam konsentrasi Hukum Tata Negara.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian Rokan Hulu. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan peneliti.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan teratur (*sistematis*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-motede sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian.

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian Hukum Sosiologis adalah penelitian yang mengkaji Hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang di alami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat atau suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya Hukum di lingkungan masyarakat.¹⁵
- b. Sifat penelitian ini adalah tergolong deskriptif, yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan dalam hal ini tentunya akan memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian dan di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁶

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian.¹⁷ Lokasi penelitian harus sesuai dengan judul yang diteliti, lokasi pada penelitian ini adalah di Lapas Kelas IIB Pasirpengaraia, Kabupaten Rokan Hulu , Provinsi Riau.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pres, 2020), h. 83.

¹⁶ *Ibid*, h.87.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2015), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah penghuni Lapas Kelas IIB Pasirpangraian. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian kepada beberapa sumber yang terdapat di dalam Lapas tersebut. Dengan melakukan penelitian terhadap beberapa sumber tersebut kiranya dapat membantu memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dengan berbagai sudut pandang.

b. Objek Penelitian.

Objek penelitian ini ialah Pasal 3 Poin (b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan.

F. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Garafika, 2015), h, 106.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bentuk Laporan, Skripsi, Tesis, disertai dan Peraturan Perundang-undangan.

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian seperti, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Pengadilan Militer, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁹

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder adalah Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek Penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan Hukum Primer atau bahan Hukum Sekunder yang berasal dari Kamus, Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar dan sebagainya

¹⁹ *Ibid.*

G. Metode Pengumpulan Data

Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata yang diteliti.
2. Wawancara yaitu melakukan komunikasi tanya jawab langsung dengan para pihak terkait selaku informan guna melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk penelitian.
3. Kusioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpul data primer secara langsung dari Responden yang ditentukan sebelumnya dilokasi penelitian.
4. Studi kepustakaan yaitu melakukan penggalian data dari berbagai sumber literatur untuk melengkapi berbagai data pada penelitian

H. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi Penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau,sifat yang sama.²⁰ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Lapas dan pegawai Pemasyarakatan

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cekkan ke -5, h.119.

dan serta narapidana dengan menggunakan *purposive sampling* (adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu).²¹

Tabel I.1
Populasi dan sampel

| Responden | Populasi | Sampel | Ket |
|----------------------|----------|--------|-----|
| Pegawai masyarakatan | 89 | 25 | 22% |
| Narapidana | 855 | 214 | 25% |
| Jumlah | 954 | 239 | - |

Sumber: Data Dari Lembaga Masyarakatan Kelas IIB Pasipengaraian

I. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik mendukung, menambah, atau memberikan komentardan kemudia membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya. Penulis menggunakan analisis yang bersifat induktif. Teknik analisa dengan menggunakan metode induktif merupakan tekni analisa yang dilakukan dengan cara mengoprasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian.²² Penarikan kesimpulan secara induktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses berpikir dengan menyimpulkan sesuatu yang sifatnya khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 129.

²² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN Maliki, 2010), h. 130.

J. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi Terbagi menjadi V (lima) bab yang terdiri dari beberapa Sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah. Selain itu juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang mencakup Jenis penelitian, Lokasi dan waktu Penelitian, Informan Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan Penelitian ini.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah berdirinya Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian, visi dan misi Lapas kelas IIB Pasirpengaraian, akan menjelaskan berapa jumlah pegawai Lapas, dan jumlah tahanan dan akan menjelaskan tugas dan fungsi Lapas kelas IIB Pasirpengaraian dan Struktur organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian Implementasi atau Pelaksanaan, menjelaskan pengertian pidana dan jenis pidana, menjelaskan pengertian sejarah Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan dan hak-hak narapidana.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian yang membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan membahas tentang apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasirpengaraian.

BAB V : PENUTUP

Didalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan temuan-temuan dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian yang berkaitan tentang Judul Skripsi ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah lembaga pemasyarakatan kelas II B pasirpengaraian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian dalam perkembangannya telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian pada awalnya merupakan sebuah penjara yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka penjara ini diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan masih menggunakan bangun lama yang terletak di jalan Riau Nomor 1 Kampung Torondom, Kabupaten Kampar.²³

Pada Tahun anggaran 1985 atau 1986, kantor Penjara yang telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian, dipindahkan ke jalan Pengayoman dan mulai dioperasikan pada Tahun 1988. Seiring perkembangan zaman dan pemekaran daerah, kini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian masuk dalam daerah pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Yang terletak di jalan pengayoman Nomor 33 desa koto tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Lapas kelas II B pasirpengaraian mempunyai Luas Tanah 20110 m2 dan luas bangunan 3567 m2 yang terdiri dari luas bangunan kantor 942 m2 dan luas blok hunian 1079 serta fasilitas penunjang lainnya dengan luas 16543 m2 yang meliputi:

²³ Siti Fatimah Lubis, ” *Pengunaan Hak Fasahk Oleh Istri Narapidana 2 Tahun di Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian*”, (Uin Suska : 2020), h, 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tempat Ibadah (Masjid)
2. Dapur Umum
3. Poliklinik
4. Aula kantor
5. Bengkel kerja
6. Kebun pertanian
7. Perternakan
8. Perikanan
9. Lapangan Olahraga serta,
10. Ruang layanan Kunjungan.

B. Jumlah pegawai pemasyarakatan dan kapasitas lapas pasirpengarain.

1. Jumlah petugas

Jumlah petugas pemasyarakatan kelas IIB pasirpengaraian adalah sebagai berikut.²⁴

Tabel II.I

Jumlah pegawai lapas

| No | Jensi kelamin | Jumlah |
|----|---------------|---------------------------|
| 1 | Laki | 82 orang |
| 2 | Perempuan | 7 orang |
| | Total | 89 petugas pemasyarakatan |

Sumber : lapas kelas IIB pasirpengarian

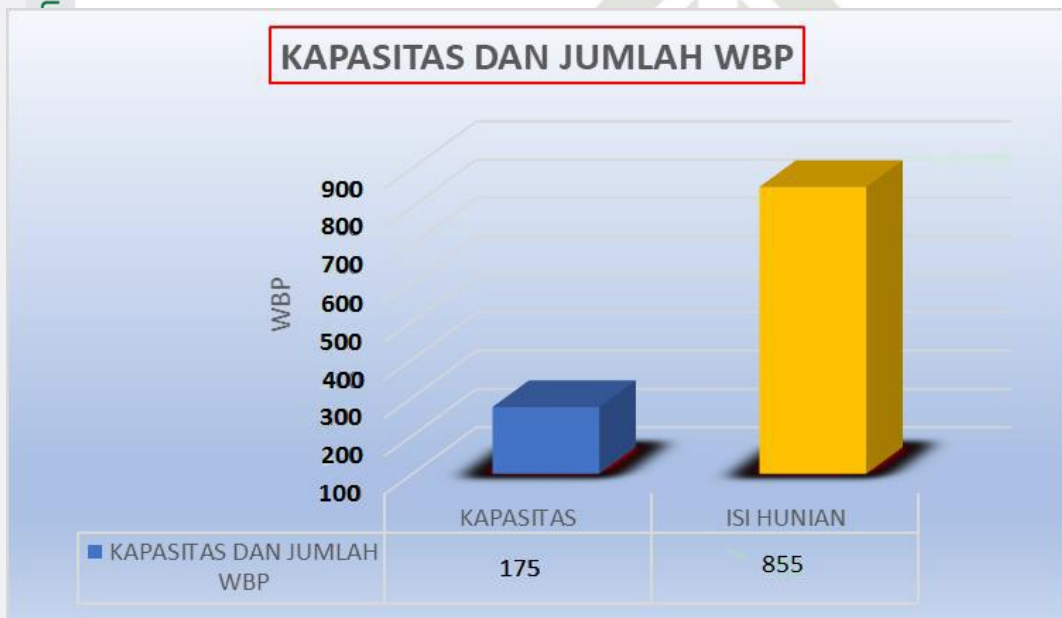
²⁴ Wawancara Dengan Nara Sumber (Muhammad Lukman Selaku Kepala Lapas) Pada Tanggal 28 Juni 2021 Pukul 11: 00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Kapasitas lapas

Kapasitas atau muatan tampungan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pasirpengaraian adalah sebesar 175 (*seratus tujuh puluh lima*) orang.²⁵ Sedangkan isi saat ini per 31 Desember 2020 berjumlah Narapidana 668 (*Enam ratus enam puluh delapan*) orang dan tahanan 187 (*seratus delapan puluh tujuh*) orang sehingga total penghuni 855 (*delapan ratus lima puluh lima*) orang.²⁶



Gambar 2:1 diagram kapasitas lapas pasirpengaraian

C. Visi Dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian

Visi

Menjadikan Lapas yang Profesional, Akuntabilitas, Sinergi, Transparan dan Inovatif dalam memberikan Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan²⁷.

²⁵ Wawancara Dengan Narasumber (Bapak Boy Selaku Devisi Pembinaan) Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul 10: 32

²⁶ SDP Sistem Database Pemasyarakatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi

1. Membangun karakter dan mengembangkan sikap ketakwaan, sopan santun dan kejujuran pada diri warga binaan.
2. Mewujudkan sistem perlakuan humanis yang memberikan rasa aman, yaman, berkeadilan dan bertekad tanpa pungutan liar.
3. Melakukan Pembinaan, perawatan dan dan pembimbingan untuk mengembalikan Narapidana menjadi warga Negara yang aktif dan produktif ditengah-tengah masyarakat.
4. Membangun karakter dan budaya bersih melayani, sopan santun dan jujur dalam melayani warga binaan pemasyarakatan dan keluarga atau warga masyarakat yang berkunjung.

D. Tugas dan Fungsi Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pasirpengaraian.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIB pasirpengaraian Adalah Unit Pelaksanaan Teknis dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan dibidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan Pembinaan yang berkala dan berkelanjutan Bagi Wargabinaan Pemasyarakatan yang bertujuan agar Narapidana menyadari kesalahannya dan tidak berkeinginan lagi untuk melakukan tindak pidana. Tugas dan fungsi Pemasyarakatan meliputi:

²⁷ <https://WWW.lppsp.id/p/visi-dan-misi-lembaga-pemasyarakatan.html>, Diakses 18 Juni

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Pokok

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB PasirPengaraian mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik.

Fungsi

1. Melakukan Pembinaan Narapidanan dan anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja .
3. Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian Narapidana atau anak didik.
4. Melakukan pemelihara keamanan dan tata tertib LAPAS.
5. Melakukan tata usaha dan rumah tanga.

E. Tugas dan Fungsi Wewenang Kerja Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian

Tugas dan fungsi setiap struktur Yang mana klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Adapun tugas fungsi dan wewenang kerja Lapas Klas IIB PasirPengaraian adalah:²⁸

1. Bagian Tata Usaha.

Seuai dengan Pasal 46 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

²⁸ Wawancara Dengan Nara Sumber (Anggoro Petugas Lapas) Pada Tanggal 24 Juni 2021 Pukul 2:00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diatur dalam Pasal 47 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 sebagai berikut²⁹ :

- a. Melakukan urusan kepegawaian ;
- b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Agar tugas dan fungsi sub bagian tata usaha yang ingin di capai dan tercapai maksud dan tujuannya, sesuai Pasal 48 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagian Tata Usaha di batu oleh beberapa Sub bagian yang dibawahinya adalah bagian Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan bagian Urusan Umum.

2. Seksi bimbingan kerja atau anak didik dan kegiatan kerja.

Seksi bimbingan narapidana atau anak didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada seksi bimbingan narapidana atau anak didik dan kegiatan kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana atau anak didik.
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana atau anak didik.

²⁹ Lapas Pasirpengaraian, *LAKIP Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian Semester II TA. 2020*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

seksi bimbingan narapidana atau anak didik dan kegiatan kerja terdiri dari³⁰ :

1. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan.

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana atau anak didik.

2. Sub Seksi Perawatan Narapidana atau Anak didik.

Sub Seksi Perawatan Narapidana atau Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana atau anak didik.

3. Sub seksi kegiatan kerja.

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

4. Seksi Keamanan Dan Tata Tertib.

Seksi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi³¹ :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- a. Sub seksi keamanan.

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

- b. Sub seksi pelapor dan tata tertib.

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

5. Kesatuan keamanan LAPAS

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi :

³¹ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Didik.
- b. Melakukan pemeliharaan.
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penetapan dan pengeluaran Narapidana tau anak didik.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan.

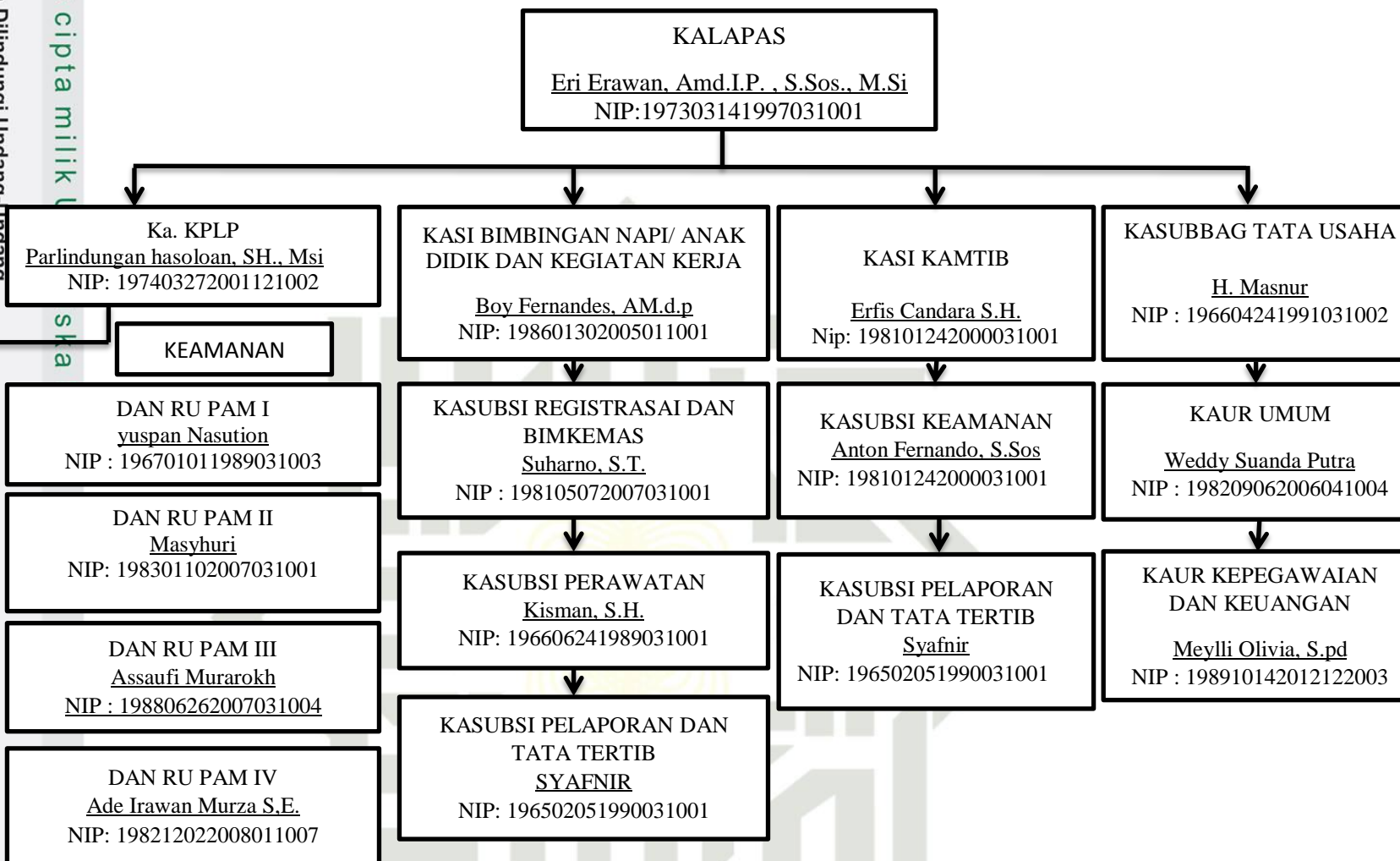
Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.³²

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan, Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lapas serta dengan instansi lain diluar Lapas sesuai dengan pokok masing-masing maupun antar satu organisasi dalam lingkungan Lapas.

³² Ibid.



F. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelaksanaan adalah Proses, Cara, Perbuatan Melaksanakan Rancangan, Keputusan dan sebagainya.³³

Menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (200:81), “ *mengatakan bahwa Implementasi adalah Proses Mentrasformasikan suatu rencana ke dalam Praktek*”.³⁴ Jadi Pelaksanaan atau implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Orang sering beranggapan bahwa Implementasi atau Pelaksanaan hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan Legislasi atau para spngambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya dapat dilihat dan diamati sendiri bahwa betapapun baiknya Rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Keberhasilan suatu pelaksanaan atau implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai dan tidaknya

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, [Http://Kbbi.Web.Id](http://Kbbi.Web.Id), Diakses: 21 Juni 2021.

³⁴ Harbani Pasalong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta,2019), H, 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan-tujuan yang ingin diraih. Menurut Weimer dan Aidan R. Vining (1999:398) ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:³⁵

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan. Yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat kerja sama yang dibuthkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama telah merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan Komitment untuk mengolah pelaksanaan.

Gow dan Morss mengatakan dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan antara lain:³⁶

1. Hambatan publik.
2. Kelemahan institusi.
3. Ketidak mampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Kekurangan dalam bantuan teknis .
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi.
6. Pengaturan waktu (*taiming*).
7. Sistem informasi yang kurang mendukung.
8. Perbedaan agenda tujuan aktor.
9. Dukungan yang berkesinambungan.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi atau dikontrol dan salah satu mekanismenya pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi digunakan untuk mempelajari hasil atau sejauhmana keefektifan kebijakan guna untuk mempertanggung jawabkan hasil kepada pihak yang mensponsori program tersebut. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

B. Tinjauan umum Pidana dan Jenis Pidana

1. Definisi Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai Sanksi Pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu Hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan Hukuman, pemberian pidana, dan Hukum pidana. Menurut Roslan Saleh Pidana adalah Reaksi atas Delik dan ini berwujud suatu Nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat Delik itu.³⁷ Hukum pidana bersifat siksaan atau penderitaan yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan yang ditentukan oleh Undang-undang. Hukum pidana adalah sebagai *Ultimatum Remedium* (obat terakhir) dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan Masyarakat.³⁸

Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki atau Merehabilitasi penjahat menjadi baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan

³⁷ Belo, *Pertanggung Jawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*, volume 6 Nomor 1 Agustus 2020-Januari 2021, h. 15.

³⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 236-237.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keeseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Maka dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya tujuan dijatuhkannya pidana adalah untuk Merehabilitasi perilakunya dan mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat.³⁹

2. Jenis pidana

Jenis-jenis pidana tercantum didalam Pasal 10 KUHP.⁴⁰ Jenis-jenisnya dibedakan antara antara pidana pokok dan dan pidana tambahan terdiri dari lima jenis pidana antara lain:

Pertama Pidana Mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, yang sudah berlangsung Berabad-abad lamanya. Pidana mati atau juga lebih dikenal dengan hukuman Mati yang banyak diterapkan diberbagai Negara khususnya Negara Indonesia. Di Indonesia itu sendiri hukam Mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagai mana yang dimaksud dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatugkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Militer.⁴¹ Yang berbunyi “ *dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjelasan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan*

³⁹ Sahesen, *Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, 2015, Jurnal Hukum.

⁴⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h, 5-6

⁴¹ Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatugkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Militer.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan cara ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal berikut.”. sampai saat ini pelaksanaan hukuman mati memang dilaksanakan dengan cara ditembak oleh Resu Penembak, dan dahulu Indonesia pelaksanaan pidana dilakukan dengan cara menggantung pelaku tindak pidana sampai mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP.

Kedua, Pidana Penjara. Didalam Pasal 12 KUHP, Pidana Penjara ialah Pidana Penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu.⁴² Pidana Penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas Tahun berturut-turut. Pidana Penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh Tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, Pidana seumur hidup, dan Pidana Penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas Lima Belas Tahun dapat dilampaui karena berbarengan (*concorus*), pengulangan Resedivis atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52, dan 52a.⁴³

Ketiga, Pidana Kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan yang paling lama satu Tahun (Pasal 18 Ayat 1) KUHP. Tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan Hukuman Penjara paling lama Satu Tahun Empat Bulan (Pasal 18 Ayat 3) KUHP, serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada daripada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat 2) KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana Pelanggaran, atau sebagai pengganti denda yang tidak bisa dibayarkan.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, Pidana Denda. Pidana Denda yang terdapat dalam kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) jikalau diterapkan dalam zaman sekarang tentunya sudah sangat Relevan lagi, mengingat perkembangan nilai Rupiah sudah berubah. Contoh seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian dimana pidana dendanya hanya paling banyak Sembilan Ratus Rupiah. Tentu hal tersebut sudah tidak Relevan, oleh karena itu dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA untuk menyesuaikan dalam penjatuhan Hukuman berupa denda kepada terdakwa seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.⁴⁴

Kelima, Pidana Tutupan. Pidana Tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Menurut Andi Manzah didalam Buku Asas-asas Hukuman pidana mengatakan Pidana Tutupan disediakan bagi para Politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh Ideologi yang dianutnya.⁴⁵

Pidana tambahan terdiri dari tiga jenis antarlain yaitu :

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Dan pengumuman keputusan Hakim.

⁴⁴ <https://www.dl-advokat.com/2020/01/5-jenis-pidana-pokok-pokok-yang-perlu-kamu-https://1>. Di akses sabtu 17 juli 2021.

⁴⁵ <https://m.hukumonline.com/link/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan>. Diakses kamis 15 juli 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Tinjauan Umum Penjara Atau Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan Pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.⁴⁶ Keberadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade, dahulu dikenal dengan sebutan Penjara.⁴⁷ Berdasarkan asal usul katanya penjara berasal dari bahasa jawa yaitu *Penjoro* yang berarti *Tobat* atau *Jera*.⁴⁸ Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman). Lembaga Pemasyarakatan merupakan Institusi yang menjalankan peran untuk melaksanakan Pembinaan narapidana.

Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Suhardjo pada Tahun 1962. Sejak Tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan Pembinaan Bagi Warga Binaan (WBP).

Penggunaan istilah Pemasyarakatan sudah berlaku sejak Tahun 1962, yaitu dalam pidato Menteri Kehakiman Suhardjo pada Tanggal 12 Januari 1962 yang disampaikan di Blitar ketika meresmikan penggunaan gedung Rumah Pendidikan Negara yang baru selesai dibangun kembali. Ide Pemasyaraktan ini dipertegas kembali oleh Suhardjo pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidatonya tentang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Josias Simon, *Budaya Penjara Pemahaman Dan Impelementasi*, (Bandung: Karya Putra Daryati 2012), h. 1.

⁴⁸ Josias Simon dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Cv Lubuk Agung, 2011), h. 4-6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsepsi Hukum Nasional yang disampaikan dalam penganugerahan Gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Indonesia dengan dihadiri Bapak Presiden Indonesia (pada waktu itu) yaitu Soekarno. Istilah Pemasyarakatan secara resmi dipergunakan sejak 27 April 1964 melalui Amanat Presiden Republik Indonesia sehubungan dengan konfrensi Dinas Kependidikan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April sampai dengan 7 Mei 1964.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice syestem*).⁴⁹ Dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara Pembinaan, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan Hukum.

D. Tinjauan Umum Narapidana dan Pembinaan.

1. Narapidana

Narapidana adalah Manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum narapidana adalah Manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat menyamakan begitu saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan Manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan kehilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bagaimanapun juga narapidana adalah Manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terkait dengan masalah tersebut, Kiran bedi dalam bukunya "*It's always*

⁴⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Possible” yang dikutip oleh Adi Sujatno, mengemukakan bahwa : “Manusia-Manusia yang terkungkung di dalam dinding penjara itu sebenarnya memiliki seluruh waktu, tenaga dan keterampilan yang merupakan dasar dari setiap masyarakat yang mempunyai motivasi, karena itu yang perlu dilakukan ialah mengidentifikasi serta mengenal bakat-bakat mereka dengan pengarahan dan bimbingan”⁵⁰

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani Pembinaan dilembaga pemasyarakatan.

2. Pembinaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pada hakikatnya narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya Manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan Manusia dalam satu sistem Pembinaan yang terpadu agar kembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat dan Negara.⁵¹ Pembinaan dan pembimbingan wargabinaan atau narapidana diselenggarakan oleh mentri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.⁵² Hal ini menunjukkan bahwa Pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga

⁵⁰ Adi Sujatno, *Pencerahan Kepemimpinan di Balik Penjara*, Cetakan Ketiga, Vetlas 274 Pas, Jakarta, 2009, hal. 9-10.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Pasal (7) Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.

Pembinaan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 9 adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas narapidana.⁵³

Dalam melakukan Program Pembinaan narapidana akan ditetapkan atau ditempatkan sesuai dengan ketetapan direktur jendral (untuk *lapas super maximum security*) dan akan ditetapkan oleh kepala kantor wilayah (untuk *Lapas maximum security*, *Lapas medium security* dan *Lapas minimum Security*). Pembinaan narapidana tergantung dimana diletaknya narapidana tersebut antaralain:

1. *Lapas super maximum security*
2. *Lapas maximum security*
3. *Lapas medium security*
4. *Lapas minumum security*

Menurut UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilakukan dengan Asas-Asas sebagai berikut:

1. Pengayoman.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
3. Pendidikan.

⁵³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembimbingan.
5. Penghormatan harkat dan martabat Manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
7. Terjaminya Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan Pembinaan antarlain adalah⁵⁴ :

1. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi Manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun Bangsa dan Negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaann didunia maupun diakhirat.

Berdasarkan konfrensi kepenjaraan dilembang menghasilkan beberapa

Prinsip dalam melakukan pembinaan narapidana antarlain sebagai berikut⁵⁵:

1. Pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara melainkan merupakan pula suatu cara atau sistem perlakuan terpidana.
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses perlakuan yang menganut prinsip Gotong Royong, yakni antara petugas, terpidana dan masyarakat.
3. Tujuan pemasyarakatan adalah untuk mencapai kesatuan hubungan hidup kehidupan, kehidupan yang terjalin antara terpidana dan Masyarakat.

⁵⁴ Harson, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 2021), h, 47.

⁵⁵ Andi Wijaya, *Pemasyarakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2011), h, 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fokus dari pemasyarakatan bukan individu terpidana secara eksklusif, melainkan kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat.
5. Terpidana harus dipandang sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum, tidak karena ia ingin melanggar hukum, melainkan karena ia ditinggalkan dan tertinggal dalam mengikuti derap kehidupan masyarakat yang makin lama makin kompleks
6. Terpidana harus dipandang sebagai Manusia mahluk tuhan yang seperti Manusia-Manusia lainnya mempunyai potensi dan itikad untuk menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyarakat.
7. Semuan unsur yang terlibat dalam proses peradilan pada hakekatnya menyukai perdamaian dan pada waktunya tidak segan untuk memberikan maaf.
8. Petugas pemasyarakatan harus menghayati prinsip-prinsip kegotong-Royongan dan harus menempatkan dirinya sebagai salah satu unsur dalam kegotong-Royongan.
9. Tidak boleh ada paksaan dalam kegotong-royongan tujuan harus dapat dicapai melalui *self propeling adjustment and readjustment approach* yang harus dipakai ialah *approach* antar sesama Manusia.
10. Lembaga pemasyarakatan adalah untuk operasional untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dan bukan bangunan, bangunan hanya sarana.
11. Tujuan akhir dari pemasyarakatan adalah adil dan makmur berdasarkan PANCASILA.

E. Tinjauan Umum Hak-hak Narapidana

Hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu:

1. Melakukan Ibadah sesuai Agama dan Kepercayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dimana peraturan pemerintah ini membahas secara lebih terperinci mengenai hak-hak yang diberikan kepada narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, setiap narapidana berhak untuk melakukan Ibadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya.⁵⁶ Selain berhak untuk melakukan ibadah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 juga tercantum mengenai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kerja.

2. Mendapatkan perawatan baik perawatan Rohani maupun Jasmani.

Perihal hak mendapatkan perawatan Rohani dan perawatan Jasmani, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mencantumkannya dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1999, perawatan rohani dan jasmani dilakukan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

⁵⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Peraturan Pemerintah ini mencantumkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ini tercantum bahwa setiap narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.⁵⁷

5. Menyampaikan keluhan

Setiap orang yang hidup pasti mempunyai masalah sehingga menimbulkan keluhan yang menghasilkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut maka seseorang bisa saja membutuhkan orang lain yang di percayainya untuk menyampaikan keluhannya atau saling bercerita untuk mendapat jalan keluarnya.

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

⁵⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menambah wawasan Para narapidana, maka hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Perihal Hak Mendapatkan Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa, setiap lembaga pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan dan media massa baik berupa media cetak maupun media elektronik yang dapat menunjang program pembinaan kepribadian narapidana dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Setiap narapidana yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah atau premi yang mana besarnya upah atau premi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upah diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan, sedangkan premi diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.

8. Menerima kunjungan.

Hak narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu dan lainnya adalah salah satu hak yang wajib diberikan kepada para narapidana, di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia wajib menyediakan suatu ruangan sekurang-kurangnya 1 ruangan khusus untuk menerima kunjungan tersebut.

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mendapat kurangan masa pidana (Remisi)

Hak untuk mendapatkan remisi, setiap narapidana yang menjalankan masa pidananya berkelakuan baik berhak untuk mendapatkan Remisi. Remisi dapat ditambah apabila narapidana berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti kunjungan keluarga.

Narapidana berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Untuk cuti mengunjungi keluarga diberikan paling lama 2 hari atau 2 x 24 jam, serta keluarga bertanggung jawab atas narapidana yang cuti untuk mengunjungi keluarga.⁵⁹

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik.

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas setelah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik

⁵⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan hak-hak lain disini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Yang dimaksud dengan hak keperdataan disini antara lain adalah surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya dan izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal-hal luar biasa.⁶⁰

⁶⁰ Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara pidana di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017) ,h.86



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian Rokan Hulu, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembinaan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pasirpengaraian sudah berjalan dan menggunakan pola Pembinaan keperibadian dan Pembinaan kemandirian, Pembinaan keperibadian meliputi: *pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, pembinaan kesadaran hukum.* dan untuk pembinaan kemandirian antara lain : *keterampilan untuk mendukung usaha mandiri , (membuat kerajinan tangan dan alat-alat rumah tangga), keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri, pertanian, peternakan, perikanan dan keterampilan untuk wirausaha kecil.* Didalam melaksanakan Pembinaan kemandirian narapidana yang sudah mendapatkan pendidikan tingkat mahir akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan setifikasi oleh pihak terkait. Namun pelaksanaan Pembinaan belum berjalan dengan optimal seperti yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dikarena Pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Pasirpengaraian ada beberapa tidak berkelanjutan dan program pembinaan kemandirian untuk narapidana wanita belum dilaksanakan atau belum terealisasi.

2. Faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian yaitu:

1. *Faktor overcrowded*, (penuh sesak)
2. Faktor kurangnya anggaran dana.
3. Faktor kurangnya sarana gedung dan fasilitas.
4. Faktor kurangnya Petuga Petugas Lapas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian harus sesegeramungkin merealisasikan program Pembinaan untuk para wanita , sebab mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan Pembinaan.
2. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB pasirpengaraian harus membuat pola Pembinaan yang sifatnya agamis, atau harus menerapkan peraturan dasar-dasar agama dari setiap kepercayaan masing-masing. Contohnya ialah mewajibkan solat 5 waktu untuk ummat islam dan peribadatan hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minggu untuk umat kristen dan mewajibkan puasa dibulan romadan untuk umat islam. Agar mereka semakin dekat dengan pencipta dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

3. Pemerintah dalam hal ini kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus memperhatikan kondisi semua Lembaga Pemasyarakatan Terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian. Seperti menyiapkan sarana dan prasarana Lapas, agar Pembinaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pemerintah juga perlu memberikan solusi permasalahan *overcrowded* pada Lapas, karna hal ini sangat mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan pembinaan narapidana.
4. Pemerintahan Indonesia (*eksekutif, legislatif, dan yudikatif*) harus mencari solusi sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia, harus menerapkan sistem pemasyarakatan yang meminimalkan Anggaran dan memperoleh hasil yang maksimal dan harus membuat efek yang jera.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abu Samah Dan Ali B Embi, 2019. *Filsafat Hukum*. Panam-Pekanbaru: Cahaya Firdaus
- Adi Sujatno. *Pencerahan Kepemimpinan di Balik Penjara*. 2009. Cetakan Ketiga. Vetlas 274 Pas, Jakarta
- Andi Wijaya. *Pemasyarakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*. 2011. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan
- Aristo M.A. Pangaribuan. dkk. *Pengantar Hukum Acara pidana di Indonesia*. 2017. (Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Purnomo. *2016 Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan* Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. 2011. Jakarta: Rajawali Pers
- Harbani Pasalong. *Teori Administrasi Publik*. 2019. Bandung: Alfabeta
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. 2021 Jakarata : Djambatan
- Josias Simon Dan Thomas Sunaryo. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. 2011. Bandung: Cv Lubuk Agung
- Josias Simon. *Budaya Penjara Pemahaman Dan Impelementasi*. 2012. (Bandung: Karya Putra Daryati
- Kusnandi Dan Harmaily Ibrahim. 2014. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PD Budi Chaniago
- Lysa Angrayni. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2017 Depok Sleman Yogyakarta : Kalimedia
- Moh Najir. *Metode Penelitian*. 2017. Bogor: Ghalia Indonesia
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* . 2010. Malang : UIN Maliki
- Muhammad Amin, *Metode Penelitian Hukum*. 2020. (Mataram: Mataram University Pres)
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2014. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Supriyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. 2019. Bandung : Alfabeta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. 2015 Jakarta : Raja Grafindo Persada

Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. 2014. Jakarta: Sinar Grafika

Zamudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 2015. Jakarta : Sinar Garafika

Jurnal

Beo, *Pertanggung Jawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus*, volume 6 Nomor 1 Agustus 2020-Januari 2021

Jurnal Hukum Sahesen, Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, volume 1 Nomor 1 Tahun 2015

Lapas Pasirpengaraian, *LAKIP Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lapas Kelas IIB Pasirpengaraian semester II TA. 2020*

Nur Hidayat, *Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga*, UIR Review Volume 01 Nomor 02 Oktober 2017

Skripsi

Yuni Irama Sianturi Skripsi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kriminalitas Disumatra Utara Tahun 2019 Dengan Analisis Jalur* (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2020)

Tesis

Si Fatimah Lubis, ” *Pengunaan Hak Fasahk Oleh Istri Narapidana 2 Tahun Dilapasa Kelas IIB Pasirpengaraian*”, (Pekanbaru : Uin Suska , 2020)

Peraturan Perundang-undangan

Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*. 2014 jakarta: Rineka Cipta

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. 2016. jakarta: PT Bumi Aksara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Pengadilan Militer

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.

Internet

GoRiau.com, Kamis 25 Februari 2021, Cabuli Anak Usia 16 Tahun sebanyak 3 kali, aksi bejad Resedivis di Rohul ketahuan dari Chat Whatsaapp, <http://m.goriau.com/berita/baca/cabuli/-anak-usia-16-Tahun-sebanyak-3-kali-aksi-bejad-resedivis-di-rohul-ketahuan-ketahuan-dari-chat-whatsapp.html>

<https://m.Hukumonline.com/link/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan>

<https://www.dl-advokat.com/2020/01/5-jenis-pidana-pokok-pokok-yang-perlu-kamu-.html?=1>

<https://www.lppsp.id/p/visi-dan-misi-lembaga-pemasyarakatan.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <Http://Kbbi.Web.Id>

Tribun Satu, Rabu, 30 Oktober 2020, Sat Narkoba Polres Rohul Gencar Berantas Jaringan Narkoba , 30 Gram Sabu Diamankan, <https://m.tribunsatu.com/read-15042-2020-09-30-sat-narkoba-polres-rohul-gencar-berantas-jaringan-narkoba-80-gram-sabu-di-amankan>

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan Judul ***"Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpengaraian Rokan Hulu"***.

Nama : Bisman

Nim : 11727101877

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimonogaskan pada :

Hari / Tanggal : Selasa 19 Oktober 2021

Jam : 08:00 – 12:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munogosa Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munogosa

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rabu 03 November 2021

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M. Ag.

Sekretaris

Musrifah S.H., M.H.

Penguji I

Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji II

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

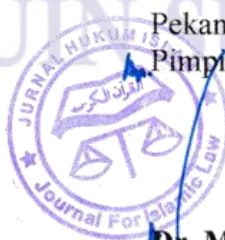
Nama : BISMAN
NPM : 11727101877
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIRPENGARAIAN ROKAN HULU

Pembimbing : Dr. H. Maghfiroh, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 November 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptanya Dilarang

ciptanya Dilarang

UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© H. H. R. Soebrantas
UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2480/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BISMAL
NIM : 11727101877
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASIR PENGARAIAN

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II b pasir pengaraian berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di rokan hulu.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
 Jl. Jenderal Sudirman No. 233
 Telp./ Fax. (0761) 23846 – 21860
 Laman: www.riau.kemenkumham.go.id

Nomor : W4-HM.02.03-2284
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

28 April 2021

Yth :

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIB Pasir Pengaraian

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor: Un.04/F.IV/PP.00.9/2480/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal mohon izin riset di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pasir Pengaraian, bersama ini dengan hormat kami hadapkan Mahasiswa UIN SUSKA Riau atas nama:

Nama : Bisman
 Nim : 11727101877
 Fakultas : Syari'ah & Hukum
 Perguruan Tinggi : UIN SUSKA Riau

Untuk melakukan pengambilan data/ riset di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pasir Pengaraian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan kegiatan dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan wewenang Saudara dan disesuaikan dengan tata aturan yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan.
2. Pelaksanaan kegiatan berlangsung sampai dengan selesai pengumpulan data yang diperlukan.
3. Setelah selesai menjalankan kegiatan tersebut, diminta perhatian Saudara untuk melaporkan hasilnya kepada kami.
4. Laporan Kegiatan yang sudah jadi agar dapat di fotocopy dan dijilid serta di berikan kepada kami, untuk bahan kajian hukum dan perpustakaan ilmiah.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



An. Kepala Kantor Wilayah,
 Kepala Divisi Pemasyarakatan

M. Hilal
 Nip. 196905181992031001

TEMBUSAN:

1. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU (SEBAGAI LAPORAN)
2. DEKAN FAKULTAS SYARIAH & HUKUM UIN SUSKA RIAU
3. ARSIP

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASIR PENGARAIAAN
Jln. Pengayoman No. 33 Telp./Fax. (0762) 91115 PasirPengaraian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: W4.PAS.5.HH.05.04-1719

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, menerangkan bahwa :

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Bisman |
| NIM | : 11727101877 |
| Jurusan | : Ilmu Hukum |
| Fakultas | : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum |
| Universitas | : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |
| Judul Skripsi | : Pelaksanaan Pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Rokan Hulu |

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, dengan judul :

"Pelaksanaan Pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Rokan Hulu"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Pasir Pengaraian
Pada tanggal : 12 Agustus 2021

LEMPRAWAN
NIP. 19770516 199903 1 001

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bisman, dilahirkan di Desa Mahato pada 01 Januari 1995.

Merupakan anak kedua dari Empat bersaudara, putra dari pasangan Amri dan Nurmi. Penulis menempuh Pendidikan pendidikan SD Negeri 002 Tambusai Utara yang berada di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara Kab.

Rokan Hulu tamat pada Tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Tambusai Utara yang berada di Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, dan tamat pada Tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 2 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan tamat pada Tahun 2017.

Setelah itu pada Tahun 2017 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara. Penulis magang di Kantor Camat Tampan Panam Pekanbaru pada Tahun 2019 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Pada tanggal 19 Oktober 2021 penulis dinyatakan lulus dengan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasirpangaraian Rokan Hulu.**